

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis keuangan tahun 1998 di Indonesia merupakan titik balik dalam sejarah pemerintahan negara tersebut. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah Indonesia mengubah sistem pemerintahannya dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Menurut (Hendratno, 2009) desentralisasi adalah proses pengalihan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan agar setiap daerah dapat mengatur serta mengelola wilayahnya secara mandiri. Perubahan sistem ini berdampak signifikan terhadap pemerintah daerah yang kini memperoleh kewenangan lebih luas dalam pengelolaan sumber daya serta dapat mendorong pembangunan di daerahnya masing-masing. Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons lebih cepat dan efektif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah.

Sebagai landasan hukum desentralisasi, pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut mendefinisikan peran, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola otonomi daerah. Pembentukan otonomi daerah merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan di berbagai daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan desentralisasi dan otonomi daerah, diharapkan setiap

daerah dapat mengembangkan potensi dan sumber dayanya secara optimal, sehingga tercipta keseimbangan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena mampu membuka potensi berbagai sektor di daerah-daerah di Indonesia (Saragih, 2003). Namun, yang terpenting dalam perwujudan desentralisasi dan otonomi daerah adalah pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah dan menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan fungsinya. Pada hakikatnya, Ada tiga aspek utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah., yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal, mengelola sumber daya lokal secara lebih efisien, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2018).

Dalam otonomi daerah, untuk mencapai hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan sistem otonomi daerah sebelumnya, ada dua faktor kunci yang perlu dipertimbangkan ketika menerapkannya. Faktor pertama adalah daerah di beri wewenang untuk melakukan pembiayaan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai penambahan kekayaan daerah. Faktor kedua dapat dilihat dari sisi pengeluaran anggaran keuangan daerah, dimana dalam mengelola masalah keuangan daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerahnya dengan lebih transparan dan akuntabel. Kedua faktor tersebut disebut dengan *financing reform* atau reformasi pembiayaan (Amin, 2015)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa aspek dalam pengelolaan keuangan memiliki peran yang sangat vital. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. Gubernur, bupati, atau walikota diberi kekuasaan oleh presiden untuk mengelola sumber daya negara serta berperan mewakili pemerintah daerah dalam mengelola aset yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai bagian dari fungsinya, gubernur, bupati, dan wali kota berwenang memberikan pendanaan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pendapatan daerahnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu faktor penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PAD atau pendapatan asli daerah diartikan sebagai seluruh pendapatan yang berasal dari sumber-sumber kekayaan daerah dan ditetapkan berdasarkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Halim, 2007).

Meningkatnya pendapatan asli daerah berperan dalam memperkuat kinerja keuangan daerah, sehingga mampu mendukung aktivitas pemerintahan secara lebih optimal seiring dengan pembangunan ekonomi daerah. Namun, ini Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah sepenuhnya terlepas dari dana pemerintah pusat. Pada prinsipnya, transfer masih diperlukan untuk mengkompensasi ketidakseimbangan anggaran antara pusat dan daerah yang disebabkan oleh perbedaan ketersediaan sumber daya (Syamsul, 2020). Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah mencakup beberapa komponen yang antara lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

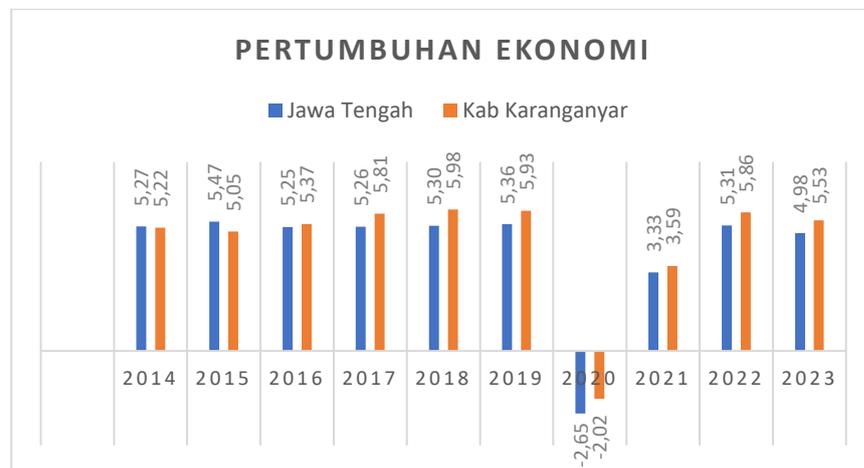
Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Dengan bantuan dana ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan publik kepada masyarakat.

Salah satu daerah yang memegang peranan penting di Indonesia adalah provinsi Jawa Tengah, yang terletak di posisi geografis yang strategis, terletak di tengah Pulau Jawa dan memiliki beragam potensi ekonomi, sosial, serta budaya. Sebagai salah satu daerah yang mempunyai populasi penduduk terbanyak di Indonesia, Jawa Tengah memainkan peran signifikan dalam perekonomian nasional. Sektor-sektor utama seperti pertanian, industri manufaktur, dan pariwisata menjadi penggerak utama perekonomian provinsi ini. Namun, dinamika dan karakteristik pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah memiliki berbagai keunikan di setiap wilayahnya, termasuk Kabupaten Karanganyar.

Terletak di bagian timur Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar berbatasan langsung dengan sejumlah daerah, seperti Sukoharjo, Sragen, dan Wonogiri. Karanganyar dikenal dengan potensi alamnya yang indah, khususnya di kawasan pegunungan seperti Tawangmangu, yang merupakan destinasi wisata unggulan. Selain itu, Karanganyar juga memiliki sektor agraris yang kuat, dengan pertanian yang menjadi salah satu sektor unggulan. Selain itu, diluar sektor pertanian, industri kecil dan menengah serta sektor pariwisata juga berkembang dengan baik, mendukung perekonomian daerah. Kabupaten Karanganyar telah berhasil menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah selama enam tahun berturut-turut dalam pemeriksaan Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Predikat tersebut diberikan BPK karena hal tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan yang

transparan, akuntabel, dan profesional. Namun, meskipun berhasil meraih predikat WTP, sekitar 70% pendapatan daerah Karanganyar masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar tergolong relatif rendah. Karena itu, diperlukan upaya yang lebih komperensif untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan, seperti pariwisata, pertanian, serta industri kecil dan menengah.

Gambar1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar

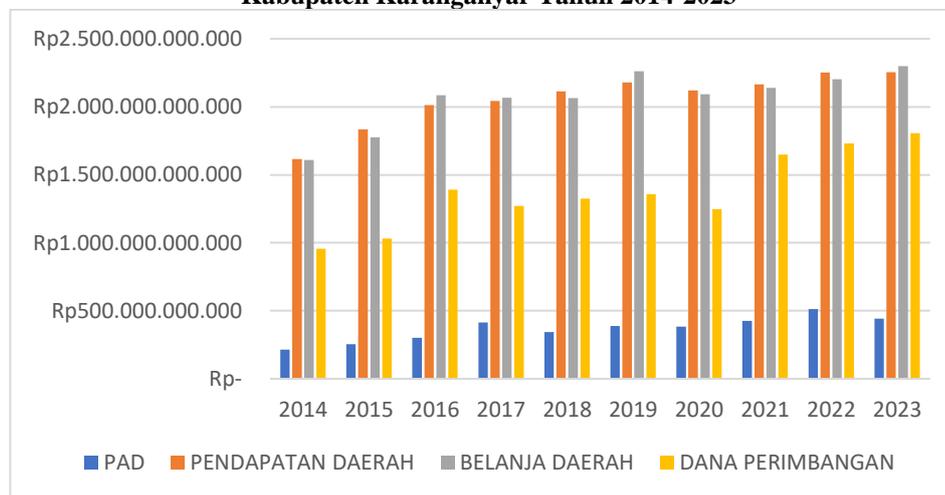


Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar 2014-2023

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar1.1 dapat dilihat Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar selama periode 2014 hingga 2023 menunjukkan perubahan yang terjadi akibat berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun luar daerah. Pada tahun 2014, ekonomi Kabupaten Karanganyar tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,22%, namun mengalami penurunan pada tahun berikutnya menjadi 5,05% di 2015. Setelah melewati fase penurunan tersebut, perekonomian Karanganyar kembali mengalami pemulihan, dengan pertumbuhan sebesar 5,37% pada 2016, meningkat lagi menjadi 5,81% di 2017, dan mencapai 5,98% pada 2018,

yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu tersebut. Tahun 2020 menjadi titik krusial bagi perekonomian Karanganyar, di mana pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan ekonomi dengan angka kontraksi sebesar -2,02%. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi kembali ke angka positif dengan 3,59%, dan pemulihan berlanjut hingga tahun 2022, di mana pertumbuhan mencapai 5,86%. Tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5,53%.

Gambar1. 2 Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah , Dan Dana Perimbangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2023



Sumber: BKD Kabupaten Karanganyar 2014-2023

Pada gambar 2.2 diatas dapat diketahui Data keuangan Kabupaten Karanganyar dari tahun 2014 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan dalam belanja daerah, pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana perimbangan. Pada tahun 2013, belanja daerah tercatat sebesar Rp 1,60 triliun dan mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp 2,25 triliun pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan operasional pemerintahan daerah. Sementara itu, PAD juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, dari Rp 215 miliar pada

tahun 2014 menjadi Rp 511,7 miliar pada tahun 2022 dan terjadi penurunan pada tahun 2023. Kenaikan PAD ini menunjukkan adanya peningkatan potensi ekonomi daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri, meskipun masih berada pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan dengan total belanja daerah yang terus meningkat setiap tahunnya.

Walaupun PAD mengalami kenaikan, Kabupaten Karanganyar masih bergantung secara signifikan terhadap penerimaan dari pemerintah pusat sebagai sumber pendanaan daerah. Pada 2014 dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten Karanganyar tercatat sebesar Rp 955 miliar dan mengalami kenaikan menjadi Rp 1,806 triliun pada 2023, dengan kontribusi sekitar 70-80% terhadap total belanja daerah setiap tahunnya. Karena Ketergantungan pada dana transfer pusat yang sangat tinggi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih terbatas, sehingga pendapatan asli yang dihasilkan dari sektor-sektor lokal belum cukup untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah secara mandiri.

Fenomena pengelolaan keuangan di Kabupaten Karanganyar menunjukkan ketergantungan yang berlebih terhadap dana transfer pemerintah pusat. Kementerian Keuangan mencatat bahwa Kabupaten Karanganyar masih mengandalkan hingga 80 persen anggaran dari pemerintah pusat untuk membiayai operasional pemerintahan daerah. Ketergantungan ini diperparah oleh keterbatasan dalam penggalan potensi daerah yang menyebabkan penerimaan asli daerah (PAD) tetap rendah. Pemekaran wilayah di beberapa daerah juga menjadi faktor yang menghambat peningkatan PAD, karena sumber daya daerah belum dimanfaatkan secara optimal.

Kinerja pengelolaan keuangan di Kabupaten Karanganyar juga menghadapi tantangan dalam hal efektivitas alokasi anggaran. Sering kali, pengeluaran anggaran tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ketidaksesuaian ini berpotensi menghambat pembangunan dan memberikan gambaran kurang optimal terhadap prinsip *value for money* dalam pengelolaan keuangan daerah. Prinsip *value for money* digunakan sebagai indikator kinerja untuk menilai sejauh mana penggunaan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah (Ardilla and Putri, 2015). Indikator ini mencakup aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam memastikan bahwa setiap alokasi dana mampu menghasilkan nilai tambah bagi pembangunan Kabupaten Karanganyar.

Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa Menteri Keuangan mendorong pemerintah daerah agar dapat lebih inovatif dalam menggali sumber pendapatan daerah dengan melalui pajak maupun metode lainnya, sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan PP No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini sangat relevan mengingat adanya ketidakcukupan pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan, serta lemahnya perencanaan anggaran yang sering kali tidak mampu mengantisipasi kebutuhan yang terus berkembang. Di sisi lain, peningkatan pengeluaran daerah yang terus berlanjut setiap tahunnya dapat menyebabkan *fiscal gap*, yang berpotensi mengakibatkan *underfinancing* dan *overfinancing*. Kondisi ini sangat berisiko karena dapat mengganggu tingkat *value for money* dari unit kinerja pemerintah daerah (Mahmudi, 2010).

Dengan demikian, terdapat hubungan yang signifikan antara pengelolaan keuangan yang tidak efisien dan tantangan dalam mencapai *value for money*, yang dapat berdampak terhadap kesanggupan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui sumber daya lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, dibutuhkan metode yang terstruktur dan strategis dalam perencanaan serta pengelolaan anggaran daerah agar dapat menciptakan sinergi antara pendapatan dan pengeluaran, serta memastikan bahwa setiap alokasi dana memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah agar lebih efisien dan mandiri dalam mengelola sumber keuangan daerah. Menurut (Nurliza Arpani and Halmawati, 2020), kemandirian fiskal daerah mengacu pada kapasitas pemerintah daerah dalam mendanai berbagai aktivitas pemerintahan di wilayahnya secara mandiri, termasuk tanggung jawab dan pengembangan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui pembayaran pajak serta retribusi yang menjadi sumber pendapatan daerah. Untuk dapat menciptakan daerah otonom dan desentralisasi yang inklusif, objektif serta bertanggung jawab, dan mendukung perekonomian yang terpusat. Maka pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel diperlukan untuk mencapai penggunaan anggaran yang optimal. Pengelolaan ini harus memperhatikan prinsip keadilan, solidaritas, serta kepentingan bersama, dengan tetap berpegang pada prinsip dasar keuangan daerah yang bersifat regional.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya temuan oleh (Dyah, Rahmadani and Supriatna, 2024) mengungkapkan bahwa rasio kemandirian secara

parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Tetapi, rasio efisiensi tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hanif, 2018) menunjukkan bahwa rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang dimana jika kemandirian dan keefektifan meningkat maka pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah juga akan ikut meningkat. Penelitian lainnya juga mengatakan bahwa tingkat desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan seiring dengan penurunan rasio derajat desentralisasi fiskal (Putra and Yeniwati, 2022).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti sebagai mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**Analisis Rasio Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh rasio kemandirian kinerja pengelolaan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar?
2. Apakah terdapat rasio efektivitas kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar?
3. Apakah terdapat pengaruh rasio efisiensi kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar?

4. Apakah terdapat pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh rasio kemandirian kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar
2. Untuk menganalisis pengaruh rasio efektivitas kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar
3. Untuk menganalisis pengaruh rasio efisiensi kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar
4. Untuk menganalisis pengaruh rasio derajat desentralisasi fiskal kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar

1.4 Ruang Lingkup

Agar penelitian ini memiliki fokus penelitian yang lebih jelas, ditetapkan beberapa batasan masalah yang mencakup pengukuran dalam “Analisis Rasio Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal.” Analisis ini akan dilihat melalui Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Karanganyar pada periode 2014-2023.

1.5 Manfaat

a) Manfaat teoritis

Manfaat dari hasil atau temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan teoritis yang bermanfaat bagi pembaca serta dapat memberikn informasi kepada pembaca mengenai pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar

b) Manfaat Praktisi

Temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan membantu pihak lain dalam proses penelitian selanjutnya.

c) Manfaat kebijakan

Temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.